



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**(Studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan
Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi

**YUNI MUSLIKAH
0706186423**

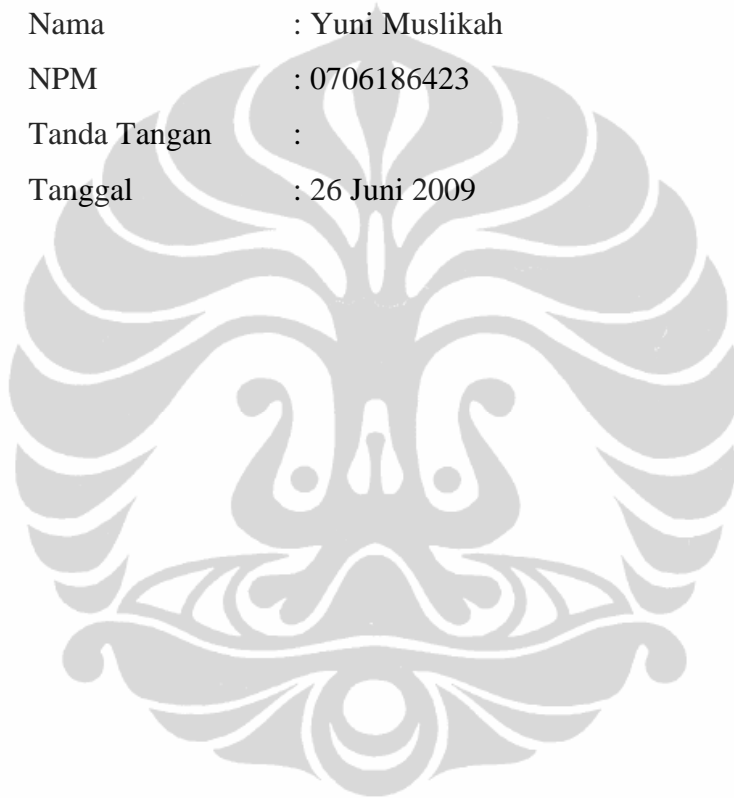
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
Kekhususan: Administrasi Kebijakan Pelayanan Publik**

**JAKARTA
JUNI, 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yuni Muslikah
NPM : 0706186423
Tanda Tangan :
Tanggal : 26 Juni 2009



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yuni Muslikah
NPM : 0706186423
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik
Judul Tesis : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah)

Pembimbing Tesis

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Yuni Muslikah
NPM : 0706186423
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Sains (M.Si.) pada Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi Kebijakan Pelayanan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein ()
Penguji Ahli : Drs. M. Riduansyah, M.Si. ()
Pembimbing : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si. ()
Sekretaris Sidang : Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos., M.Si. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Juni 2009

UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM
STUDY PROGRAM OF ADMINISTRATIVE SCIENCE

ABSTRACT

Name : Yuni Muslikah
Study Program : Administrative Science
Title : Analysis of Implementing Factors which Influenced the Implementation of the Policy at Directorate General of Intellectual Property Rights (Case Study of Memorandum of Understanding between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center)

This thesis studied analysis of factors influencing the implementation of Memorandum of Understanding (MoU) between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) on intellectual property rights (IPR) information dissemination and documentation. The objective of this MoU are to support the work of both parties in disseminating and increasing the public understanding on IPR and to give public an easy access to IPR information. Based on the experts' opinion, the influencing factors in implementing a policy are: communication, resources, attitudes and organizational structure. This research used those factors.

This research is descriptive research, using survey and questionnaire. The population and sample in this research were all of 35 staffs of Directorate of Cooperation and Development, Directorate General of Intellectual Property Rights, therefore this research is called population research, and for interviews, it used the competent key informants. Instruments used in this research were questionnaire, interviews and literature.

In general, the result of this research showed that the policy implementation of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center has not yet well-succeeded. It could be seen from the returned questionnaires and conducted interviews that the communication between echelons and staffs were not good. The resources were appropriate but they still needed technical training on IPR. Another factor was the lack of goal achievement level. For attitude of staffs, there was tendency that they become passive and waited for instruction, and they had to increase their quality. And last but not least, the increase of coordination and structural beaucrates.

Based on the above mentioned matters, there had to be things to be done in implementing the policy of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center on IPR information dissemination and documentation. Therefore, both parties should paid attention to those four factors: communication, resources, attitudes and organizational structure.

Key Words: Policy, Implementation, Memorandum of Understanding (MoU)



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI**

ABSTRAK

Nama : Yuni Muslikah
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : Analisis Faktor-Faktor Implementasi yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah)

Tesis ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah). Keberadaan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam rangka menyebarkan dan peningkatan pemahaman HKI serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi HKI. Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI yang berjumlah 35 orang sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi, sedangkan untuk wawancara yaitu dengan *key informant* yang berkompeten dibidangnya. Instrumen yang digunakan adalah kuisisioner, pedoman wawancara, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah belum berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil kuisisioner dan wawancara yang berhasil dikumpulkan ketahu bahwa komunikasi yang terjalin antara pejabat eselon dan staf pelaksana di bawahnya masih kurang terjalin dengan baik. Sumber daya yang ada sudah mencukupi tetapi masih diperlukan diklat teknis mengenai HKI. Selain itu tingkat pencapaian sasaran yang ada masih kurang. Untuk sikap pelaksana, muncul permasalahan

adanya kecenderungan staf menjadi pasif dan sekedar menunggu perintah, kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir, koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebaran informasi HKI berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perjanjian Kerja Sama



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran di dalam memberikan bimbingan dan petunjuk serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
3. Bapak. Zuliansyah Zulkarnain, S. Sos., M.Si., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
4. Seluruh staf pengajar dan staf sekretariat Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
5. Keluarga penulis, khususnya suami, orang tua dan si "cantik" yang senantiasa menemani dan memberikan bantuan dukungan material maupun moril serta doa kepada penulis.
6. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, para pejabat eselon II, III, dan IV serta seluruh staf Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang telah memberikan izin dan bantuannya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.
7. Teman-teman AKPP HAM seperjuangan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Seluruh pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.

Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran akan kami terima demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 26 Juni 2009

Yuni Muslikah



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | viii |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB 2 TINJAUAN LITERATUR | |
| 2.1 Hasil penelitian-penelitian terdahulu..... | 11 |
| 2.2 Administrasi Publik dan Perkembangannya | 14 |
| 2.3 Kebijakan Publik | 18 |
| 2.4 Implementasi Kebijakan | 20 |
| 2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan | 23 |
| 2.6 Aliansi Strategis (Kerja Sama)..... | 35 |
| 2.7 Definisi Operasionalisasi Konsep..... | 36 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 39 |
| 3.2 Tipe Penelitian | 39 |
| 3.3 Populasi dan Sampel | 40 |
| 3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data | 41 |

| | | |
|--------------|--|-----|
| 3.5 | Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 42 |
| BAB 4 | GAMBARAN UMUM DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN DAN HASIL PEMBAHASAN | |
| 4.1 | Sejarah Singkat Berdirinya Direktorat Jenderal HKI | 45 |
| 4.2 | Visi dan Misi Direktorat Jenderal HKI | 48 |
| 4.3 | Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Ditjen HKI | 49 |
| 4.4 | Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan | 51 |
| 4.5 | Data Pegawai Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan | 57 |
| 4.6 | Analisis Hasil Penelitian | 58 |
| 4.6.1 | Karakteristik Responden | 58 |
| 4.6.2 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan..... | 60 |
| 4.6.3 | Analisis Aliansi Strategis (Kerja sama) | 96 |
| 4.6.4 | Analisis secara Keseluruhan | 97 |
| Bab 5 | SIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 | Simpulan | 103 |
| 5.2 | Saran | 104 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |
| | LAMPIRAN | |

DAFTAR BAGAN

| | Hal. |
|--|-------------|
| 2.1 Model Analisis..... | 34 |
| 4.1 Susunan Organisasi Ditjen HKI | 50 |
| 4.2 Susunan Organisasi Direktorat Kerjasama dan Pengembangan | 53 |



DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|---|-------------|
| 1.1 Jumlah Permohonan Paten di Indonesia | 2 |
| 1.2 Perjanjian Kerja sama tentang HKI di Tingkat Nasional | 3 |
| 1.3 Tanggapan Responden Terhadap Implementasi Kerja Sama Nasional Antara Ditjen HKI Dengan Instansi Lain Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal | 5 |
| 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.2 Operasional Konsep | 38 |
| 4.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon | 57 |
| 4.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 57 |
| 4.3 Keadaan Responden Berdasarkan Umur | 58 |
| 4.4 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 59 |
| 4.5 Keadaan Responden Berdasarkan Jabatan | 59 |
| 4.6 Tingkat Pengetahuan Mengenai Perjanjian Kerja Sama | 61 |
| 4.7 Sumber Informasi Tingkat Pengetahuan Staf Mengenai Perjanjian\ Kerja sama | 62 |
| 4.8 Sumber Informasi Tingkat Pengetahuan Pejabat Mengenai Perjanjian\ Kerja sama | 62 |
| 4.9 Tingkat Pengetahuan akan Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama | 64 |
| 4.10 Tingkat Pengetahuan akan Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama | 65 |
| 4.11 Frekuensi Rapat Kerja Intern..... | 67 |
| 4.12 Frekuensi Rapat Kerja Intern..... | 67 |
| 4.13 Pemberitahuan Hasil Rapat..... | 68 |
| 4.14 Laporan Tugas/Pekerjaan..... | 69 |
| 4.15 Jumlah Tenaga Pelaksana..... | 71 |
| 4.16 Jumlah Tenaga Pelaksana..... | 71 |
| 4.17 Tingkat Pendidikan Formal..... | 72 |
| 4.18 Tingkat Pendidikan Formal..... | 72 |

| | | |
|------|---|----|
| 4.19 | Kualitas Tenaga Pelaksana..... | 73 |
| 4.20 | Diklat Teknis..... | 74 |
| 4.21 | Persentase yang Ikut Diklat Teknis..... | 75 |
| 4.22 | Persentase yang Ikut Diklat Teknis..... | 75 |
| 4.23 | Petunjuk Kerja..... | 76 |
| 4.24 | Monitoring dari Atasan..... | 77 |
| 4.25 | Feed Back..... | 78 |
| 4.26 | Tingkat Pencapaian Sasaran..... | 81 |
| 4.27 | Tingkat Pencapaian Sasaran..... | 81 |
| 4.28 | Dukungan dari Direktorat Lain..... | 83 |
| 4.29 | Kualitas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama..... | 87 |
| 4.30 | Koordinasi..... | 88 |
| 4.31 | Frekuensi Koordinasi..... | 89 |
| 4.32 | Frekuensi Koordinasi..... | 89 |
| 4.33 | Pedoman Kerja..... | 90 |
| 4.34 | Pembagian Kerja..... | 91 |
| 4.35 | Hubungan Kerja..... | 91 |
| 4.36 | Ketergantungan dengan Instansi..... | 92 |
| 4.37 | Sosialisasi dan Bentuknya..... | 94 |
| 4.38 | Dukungan Pimpinan..... | 95 |